

# ANALISIS *BARGAINING POWER* INDONESIA DAN PT FREEPORT INDONESIA DALAM NEGOSIASI PENGALIHAN KONTRAK KARYA MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS TAHUN 2017 – 2018

I Ketut Raharja<sup>1</sup>, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha<sup>2</sup>, Anak Agung Ayu Intan Prameswari<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

[raharjamacbeth@gmail.com](mailto:raharjamacbeth@gmail.com)<sup>1</sup>, [aabasuwinu@gmail.com](mailto:aabasuwinu@gmail.com)<sup>2</sup>, [prameswari.intan@gmail.com](mailto:prameswari.intan@gmail.com)<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*This research attempt to explain bargaining power of Indonesia and PT Freeport Indonesia in negotiating the transfer of Kontrak Karya to Izin Usaha Pertambangan Khusus from 2017 to 2018, using qualitative methods and the concept of Bargaining power as a framework. Indonesia is the Host Country of PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia also a subsidiary of Freeport McMoran. In 2017, Indonesia and PT Freeport Indonesia negotiated the transfer of Kontrak Karya to Izin Usaha Pertambangan Khusus which both of the actors used their power for the negotiations. In this research, analyze the power that owned by each actor will determine the outcome or the result of the negotiations. In addition, the negotiations in this research were carried out by two different actors, Indonesia as a State, and PT Freeport Indonesia as a Multinational Corporations which has different cost and benefit calculations.*

**Keywords:** *Indonesia, Kontrak Karya, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Bargaining power*

## 1. PENDAHULUAN

Perusahaan Multinasional atau MNC sudah tidak asing lagi kita dengar sebagai aktor dalam dunia Hubungan Internasional. Perusahaan multinasional (MNC *Multinational Corporations*) merupakan pelaku utama perubahan arena politik dan ekonomi internasional. Karena sosok organisasinya yang sangat nyata, dengan kekuatan besar dan mobilitas tinggi, MNC sering mengagumkan sekaligus menakutkan (Mas'ood 1997:3). Membahas mengenai perusahaan multinasional sering kali membuat kita membayangkan bahwa perusahaan multinasional tersebut memunculkan hal yang baik, sedangkan menimbulkan hal yang buruk di

kemudian hari, hal ini cenderung kontroversial. Sebagian masyarakat memandang perusahaan multinasional ini pembawa era baru yang lebih canggih dan praktis, sedangkan sebagian masyarakat lainnya memandang perusahaan multinasional ini hanya penghancur bagi para pelaku usaha kecil.

Perusahaan multinasional adalah grup ekonomi yang memiliki kegiatan produktif di dua atau lebih negara (Mas'ood 1997:4). Pada umumnya, suatu perusahaan multinasional memiliki induk perusahaan atau *headquarter* atau *home country*, dan memiliki anak

perusahaan di beberapa negara yang bisa dikatakan sebagai *host country*. Dengan upayanya memperluas usaha, perusahaan multinasional biasanya menggunakan penanaman modal asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI). Seperti contohnya Freeport-McMoRan yang berasal dari Amerika Serikat membangun cabang di Indonesia yaitu PT. Freeport Indonesia.

Freeport-McMoRan merupakan perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat. Freeport memiliki dan mengontrol aset yang besar, yang memiliki jangka waktu perkembangan yang panjang, dan memiliki cadangan-cadangan mineral seperti emas dan tembaga yang sangat banyak. Freeport sudah lama melakukan diversifikasi atau ekspansi perusahaan. Contohnya ke Indonesia sendiri dengan menggunakan penanaman modal asing langsung atau FDI. FDI (*Foreign Direct Investment*) atau Penanaman Modal Asing-Langsung merupakan salah satu cara bagi perusahaan multinasional untuk melakukan diversifikasi atau memperluas pasar mereka. FDI juga merupakan ciri penting dari sistem ekonomi yang semakin moderen dan kontemporer (DownToEarth, 2006). Freeport mulai menjelajahi Indonesia pada awal 1936an, tetapi Freeport tidak memiliki kekuasaan untuk mulai melakukan kegiatan produksi. Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Soekarno, memiliki sikap keras terhadap kaum kapitalis Barat yang mana menurutnya, merekalah agen-agen "penjajahan gaya baru". Sampai akhirnya kekuasaan Soekarno yang anti kapitalis ini

digantikan oleh Soeharto dimana sebaliknya, Jendral Angkatan darat pada saat itu yang membuka pintu lebar bagi perusahaan asing masuk ke Indonesia.

PT Freeport Indonesia mayoritas sahamnya dikuasai oleh Amerika Serikat sebesar 90,64%. Sedangkan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia hanya menguasai sebesar 9,36% (Arman, 2018). Melihat pembagian persentase dalam kerjasama Kontrak Karya Tersebut, bagian yang didapat oleh Indonesia tidak setara bahkan berbeda sangat jauh. Keuntungan ekonomi yang didapat Indonesia juga tidak optimal sebagai negara tuan rumah atau *host country* yang memiliki sumber daya alam.

Berbeda dengan Kontrak Karya, IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) ini memiliki kelebihan yang signifikan dibandingkan Kontrak Karya. IUPK ini diterbitkan oleh Menteri ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) Republik Indonesia, Ignasius Jonan pada Februari 2017. IUPK tersebut diberikan agar Freeport dapat melanjutkan kegiatan operasi dan produksinya di Tambang Grasberg, Papua (BBC Indonesia, 2017). Pemerintah Indonesia sepakat dengan Freeport untuk mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dengan rincian, divestasi saham 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia, membangun smelter dalam jangka waktu 5 tahun, perpanjangan kontrak operasi 20 tahun, dan masalah konsistensi dan stabilitas penerimaan negara, dimana jika dilihat

isi dari kebijakan baru IUPK lebih menguntungkan dibandingkan dengan Kontrak Karya.

Penelitian ini menjadi urgen dikarenakan PT Freeport Indonesia sejak tahun 1960-an sudah melakukan pertambangan di Indonesia dengan pembagian persentase keuntungan yang tidak setara bagi Indonesia sebagai negara tuan rumah atau *host country*. Hasil dari pertambangan Freeport ini memiliki dampak yang besar bagi perkembangan ekonomi pembangunan di Indonesia sendiri. Tetapi saat ini, terdapat proses negosiasi pengalihan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus yang telah disetujui kedua belah pihak, dimana kebijakan baru tersebut mengatur kontrak diantara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia ini.

Pengalihan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan khusus yang dilakukan oleh Indonesia dengan PT Freeport Indonesia merupakan perubahan perjanjian yang signifikan, dengan demikian membuat penelitian ini tertarik untuk meneliti *bargaining power* dalam negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan PT Freeport Indonesia mengenai pengalihan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini mempertanyakan bagaimana *bargaining power* Indonesia dan PT Freeport Indonesia dalam

negosiasi pengalihan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus.

### **Tujuan Penelitian**

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan analisis *bargaining power* yang dilakukan oleh kedua aktor yaitu Pemerintah Indonesia dan perusahaan multinasional Freeport dalam mencapai kesepakatan mengenai pengalihan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Studi terdahulu yang pertama yaitu tulisan dari Kuswanto, Herman dan Ronald yang berjudul "*Bargaining between local governments and multinational corporations in a decentralised system of governance: the cases of Ogan Kemring Ilir and Banyuwangi district in Indonesia*". Studi terdahulu yang kedua yaitu tulisan dari Tri Ratna Rinayuhani yang berjudul "*Rational Choice dalam Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia*". Studi terdahulu yang ketiga yaitu tulisan dari J. Heryanto dengan judul "*Peranan Multinational Corporations dalam Industrialisasi di Indonesia pada Era Orde Baru*".

### ***Bargaining power***

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah *bargaining power*. Menurut Branislav Slantchev (2005: 3), pengertian *bargaining power* adalah berpacu kepada tingkat keahlian atau kemampuan seorang aktor untuk dapat mempengaruhi lawannya dengan cara memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi

kepentingan lawan itu sendiri. Ketika salah satu aktor memiliki *bargaining power* yang lebih kuat dan dapat memberikan atau memenuhi keinginan dari lawannya, maka dengan begitu lawannya tersebut dapat bertindak sesuai dengan keinginan aktor yang memiliki *bargaining power* yang lebih kuat. Salah satu dari kelebihan dan kekurangan *bargaining power* suatu aktor dapat kita lihat dari negosiasi kontrak yang disepakati kedua belah pihak. Negosiasi kontrak yang lebih menguntungkan salah satu aktor akan menunjukkan *bargaining power* yang lebih kuat dari aktor tersebut ketimbang lawannya. Begitu sebaliknya, aktor yang mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit, bisa dikatakan *bargaining power*nya lebih lemah dari lawannya.

Berkaitan dengan teori-teori lain yang menggunakan model aktor rasional, *bargaining power* menurut Slantchev (2005) sangat bergantung kepada model aktor rasional tersebut. Beberapa karakteristik dari *bargaining power* adalah:

1. *Bargaining power* selalu relatif dan bukan absolut dengan arti setiap aktor mungkin hanya memiliki *bargaining power* relatif terhadap aktor lain yang saling terlibat dalam negosiasi. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa suatu negara kuat tanpa referensi ke aktor lain.

2. *Bargaining power* tidak boleh melampaui beberapa area tertentu seperti seorang aktor mungkin cukup kuat pada bidang ekonomi, tetapi kekuatan pada bidang militer atau kemanan bisa saja lemah.

3. *Bargaining power* itu strategis dan tidak menggunakan kekerasan atau militer. Dengan kekerasan suatu aktor dapat mengebom musuh, membunuh tentaranya, dan umumnya melakukan segala macam hal yang cukup merusak musuhnya. Tetapi dengan daya tawar suatu aktor bisa membuatnya melakukan penawaran aktor tersebut. Pada akhirnya, lawan akan mengambil tindakan yang aktor tersebut inginkan, yang mana sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan kekerasan atau militer.

Untuk menganalisis *bargaining power* dari setiap aktor dalam negosiasi ini, penelitian ini menggunakan *power* dari Indonesia sebagai negara maupun PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan multinasional. Menurut kaum realis memahami dimana aktor utamanya yaitu negara memiliki kekuatan atau *power* dilihat dari kekuatan militer, ekonomi, teknologi, diplomatik, dan lainnya yang dimiliki negara (Viotti & Kauppi, 2010: 53). Sedangkan menurut Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations*, kekuatan yang dimiliki negara dilihat dari geografi, sumber daya alam, kapasitas industri, kesiapan militer, populasi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi (Morgenthau, 1948: 80).

Sedangkan *power* dari PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan multinasional yaitu dilihat dari teknologi yang dibawanya, produk, kapital finansial, serta teknik manajemen yang canggih (Mas'ood 1997: 11). Selain itu, dalam jurnal Heriyana, Oatley menjelaskan ada beberapa pengaruh dari *power* perusahaan multinasional diantaranya yaitu Penanaman

Modal Asing-Langsung menciptakan masalah di negara tempat investasinya tersebut namun disisi lain menyediakan manfaat tambahan yaitu perusahaan multinasional membantu kemakmuran negara kedua tersebut dengan menyediakan sumber daya alam yang tidak ada dinegaranya (dalam hal ini Indonesia menyediakan sumber daya alam yaitu pertambangan di Papua). Selain itu, mengatur para pembuat kebijakan di negara – negara asing (tujuan investasi perusahaan multinasional). Perusahaan multinasional juga membawa kemajuan dalam bidang teknologi dan ahli – ahli dalam hal menejerial di negara tujuan investasinya tersebut serta dapat membantu negara – negara tujuan investasinya dengan memperluas akses jaringan pasar.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Sumber data dari penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder

Tulisan dalam penelitian ini menggunakan unit analisis dalam tingkat analisa negara, yaitu dengan alasan negosiasi pengalihan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus yang melibatkan Pemerintah Indonesia sebagai negara. Menurut Sugiyono, teknik dalam pengumpulan data sesuai dengan metode kualitatif, secara umum terdapat empat macam, yaitu: observasi, wawancara atau interview, dokumen, dan triangulasi. Tulisan dalam

penelitian ini mengumpulkan data melalui analisis data yang didapat melalui website, online internet, dan analisis dokumen baik offline maupun online.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Masuknya Freeport di Indonesia**

Sejarah masuknya Freeport di Indonesia berawal dimulainya ekspedisi pertama pada tahun 1936 oleh geolog A. H. Colijn. F. J. Wissel dan Jean-Jacques Dozy, serta mereka merupakan orang-orang asing pertama yang mencapai gunung gletser Jayawijaya dan menemukan sumber mineral di Ertsberg (PTFI, 2018). Selanjutnya pada tahun 1963 geolog Forbes Wilson dan Del Flint menemukan kembali Ertsberg, tetapi masih menemukan jalan buntu karena presiden Indonesia pada saat itu Soekarno, dimana Soekarno sendiri sangat menolak masuknya investor asing ke Indonesia. Pada tahun 1967 Freeport masuk ke Indonesia dengan penandatanganan Kontrak Karya 1 yang merupakan salah satu ciri khas dari PMA (Penanaman Modal Asing) pertama untuk jangka waktu 30 tahun setelah beroperasi dan beriringan dengan bergantinya presiden Indonesia ke Soeharto, dimana sebaliknya Soeharto membuka pintu lebar bagi investor asing masuk ke Indonesia. Masuknya Freeport ke Indonesia seiringan dengan Soeharto Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 (UU No.1/1967) tentang Penanaman Modal Asing.

Pengalihan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang melibatkan Indonesia sebagai *host country* dan

PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan multinasional yang berinvestasi di Indonesia dimana kebijakan yang baru tersebut berisikan 4 poin penting (ESDM, 2017) yaitu:

- Divestasi saham 51% untuk kepemilikan nasional Indonesia
- Pembangunan *Smelter* dalam waktu 5 tahun
- Stabilitas penerimaan negara (secara agregat lebih besar dibandingkan kontrak karya)
- Perpanjangan operasi 2 x 10 tahun jika memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### ***Bargaining power* Indonesia dan PT Freeport Indonesia**

Pengertian *bargaining power* adalah berpacu kepada tingkan keahlian atau kemampuan seorang aktor untuk dapat mempengaruhi lawannya dengan cara memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan lawan itu sendiri. Ketika aktor memiliki *bargaining power* yang kuat untuk dapat mengakomodasi kepentingan dari lawannya, maka lawannya dapat bertindak sesuai dengan keinginan aktor tersebut (Slantchev, 2005). Salah satu cara untuk melihat kelemahan maupun kekuatan *bargaining power* suatu aktor dapat dilihat dari kontrak atau perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Kontrak yang lebih menguntungkan satu diantara aktor tersebut menunjukkan *bargaining power* yang lebih kuat dari lawannya.

### ***Bargaining power* Indonesia**

#### 1. Tingkat Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat ekonomi suatu negara dalam hal ini yaitu Indonesia adalah data Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 1967 PDB Indonesia hanya mencapai 5,6 miliar dolar AS. Pada tahun 1996 PDB Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan meningkat 227 miliar dolar AS sebelum akhirnya menurun di tahun 1998 dengan PDB 95 miliar dolar AS, dan mengalami pertumbuhan yang signifikan kembali sampai tahun 2018 yang sudah tembus 1,04 triliun dolar AS.

#### 2. Teknologi

Trakindo, dealer resmi alat-alat berat untuk pertambangan di Indonesia, memperkenalkan teknologi *Cat® MineStar System*, yang mana merupakan solusi tepat yang mengintegrasikan produk, proses, dan sumber daya manusia (Tribunnews, 2019). Kiswanto selaku *Mining Product Lifecycle Manager* Trakindo menjelaskan, *Cat® MineStar System* ialah jawaban atas tantangan industri pertambangan yang diharapkan dapat memberi dampak baik terhadap produktivitas industri pertambangan di Indonesia.

#### 3. Populasi

Indonesia dikenal dengan memiliki populasi warga negara yang terbanyak ke-4 di dunia. Urutan pertama dipegang oleh China, India dan kemudian Amerika Serikat serta Indonesia di urutan ke-4. Menurut *The World*

*Bank*, populasi Indonesia ditahun 1967 yaitu sebanyak 105 juta orang lebih, seiringnya perkembangannya, populasi Indonesia kini meningkat sebanyak 267 juta lebih orang di tahun 2018.

#### 4. Sumber Daya Alam

Indonesia dikenal dengan negara maritim, yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah seperti hewan, tumbuhan, minyak bumi, gas alam, air, logam, tanah dan khususnya sumber daya mineral yang berada di Papua. Tambang Grasberg terletak di daerah dataran tinggi di kabupaten Mimika Provinsi Papua dimana di tambang tersebut memiliki sumber daya alam yang berlimpah, dimana disana terdapat mineral yang mengandung tembaga, emas, dan perak.

### ***Bargaining power PT Freeport Indonesia***

#### 1. Teknologi

Teknologi yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia adalah salah satunya *Advanced Simulator*. *Advanced simulator* merupakan alat untuk mengetahui bagaimana kondisi lapangan, keadaan pertambangan, dengan menggunakan teknologi yang canggih sehingga para calon pekerja atau pekerja lainnya bisa mempelajari bagaimana sistem kerja pertambangan, alat-alat berat maupun kondisi dilapangan, sehingga meminimalisir kecelakaan yang tidak diinginkan.

#### 2. Kapital Finansial atau Modal

Freeport datang ke Indonesia pasti membawa modal untuk berbagai biaya seperti biaya produksi dan biaya teknis. 75 sampai 100 juta

dolar AS dibawa oleh Freeport ke Indonesia pada tahun 1967 dengan Kontrak Karya I.

Selain itu, PT Freeport Indonesia juga menjadi perusahaan yang memberikan kontribusi langsung kepada negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Atas kontribusi penerimaan negara tersebut, PT Freeport Indonesia mendapatkan penghargaan *Indonesia Mining Association (IMA) Award 2019* (PTFI, 2019). Ido Hutabarat selaku Ketua IMA, menyatakan bahwa kontribusi PTFI terhadap target PNBP mencapai lebih dari 10% atau Rp 4,2 triliun. Kontribusi itu meningkat 51% dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar Rp 2,02 triliun saja. Tidak hanya memberikan kontribusi penerimaan negara saja, PT Freeport juga bangun *Sport Complex* senilai 400 miliar rupiah untuk PON 2020 (Pekan Olahraga Nasional 2020).

#### 3. Teknik Manajemen

PT Freeport Indonesia menjalankan dua teknik dalam melakukan kegiatan produksinya, yakni tambang terbuka (*open-pit*) di tambang Grasberg dan tambang bawah tanah. Selain itu, manajemen dari pertambangan PT Freeport Indonesia juga sangat teratur, terencana dan terorganisir. Dimana manajemen yang dimaksud disini yaitu PT Freeport Indonesia infrastruktur pendukung seperti daya listrik, perkotaan atau *camp*, klinik kesehatan dan rumah sakit, penerbangan, sarana perbengkelan, logistik dan jasa boga.

## **Analisa *Bargaining power* Indonesia Dengan PT Freeport Indonesia Dalam Pengalihan Kontrak Karya Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus**

Tulisan ini menjelaskan bagaimana mengenai *bargaining power* antara Indonesia dengan PT Freeport Indonesia dalam negosiasi pengalihan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dari hasil negosiasi tersebut dapat terlihat bahwa *bargaining power* yang dimiliki oleh Indonesia lebih kuat daripada yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia. *Bargaining power* yang menguatkan Indonesia disebabkan oleh beberapa indikator. Pada variabel ekonomi, tingkat PDB Indonesia yang tinggi membuat PT Freeport Indonesia tersaingi, karena PT Freeport Indonesia juga memiliki kapital finansial atau modal yang besar bagi Indonesia. Tingginya PDB Indonesia juga mempengaruhi banyak sektor di dalamnya, seperti pertanian, industri, jasa dan lain-lain. Indonesia menjadi meningkat. Jadi, dalam variabel ekonomi, kedua aktor baik itu Indonesia maupun PT Freeport Indonesia memiliki kondisi yang sama-sama kuat.

Pada variabel Teknologi, kedua aktor baik Indonesia maupun PT Freeport Indonesia memiliki kondisi yang sama-sama kuat. Berkaitan dengan berkembangnya tingkat ekonomi Indonesia, kapasitas teknologi Indonesia juga memiliki kemajuan seperti adanya teknologi *Cat® MineStar™ System*, yang mana sangat membantu mempermudah pekerjaan dalam pertambangan. Tetapi, teknologi yang dimiliki PT Freeport Indonesia

lebih canggih dan efisien seperti dimilikinya *advanced simulator*. Teknologi yang canggih ini didukung juga dengan argumen dari mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah Indonesia benar hanya memiliki divestasi saham sebesar 51% dan tidak keseluruhan, karena Indonesia masih bergantung dengan teknologi yang canggih dari PT Freeport Indonesia (tirta.id, 2018). Selain itu, kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro juga mengharapkan bahwa Indonesia juga harus punya kemampuan dan teknologi untuk kelola tambang di Papua itu dengan mandiri. Dengan demikian, Indonesia sudah memiliki teknologi yang cukup mumpuni tetapi masih tetap bergantung pada teknologi yang dimiliki PT Freeport Indonesia.

Pada variabel populasi, Indonesia sebagai salah satu aktor negara yang memiliki populasi besar menjadikan *bargaining power* Indonesia lebih kuat dibandingkan PT Freeport Indonesia. Menurut *The World Bank*, Indonesia memiliki populasi sebanyak 267 juta lebih di tahun 2018. PT Freeport Indonesia sebagai aktor perusahaan multinasional masih bergantung kepada populasi Indonesia, karena PT Freeport Indonesia dalam operasinya memerlukan kapasitas pekerja atau karyawan yang lumayan banyak. Menurut data dari PT Freeport Indonesia tahun 2019, jumlah tenaga kerja langsung PT Freeport Indonesia ditambah dengan kontraktor yaitu sebanyak 30.542 ribu orang, dengan komposisi 7.096 orang pekerja, 4.061 orang non papua, 2.890 orang asli Papua,

145 orang asing. Dengan demikian, Indonesia memiliki *bargaining power* yang lebih kuat dibandingkan dengan PT Freeport Indonesia, karena Indonesia memiliki populasi yang membantu PT Freeport Indonesia dalam melakukan operasi pertambangannya.

Selanjutnya, pada variabel sumber daya alam, Indonesia memiliki *bargaining power* yang kuat, karena dalam tulisan ini hanya aktor Indonesia yang memiliki sumber daya alam. PT Freeport Indonesia sebagai aktor perusahaan multinasional tidak memiliki sumber daya alam dan hanya bergantung kepada sumber daya alam Indonesia. Indonesia atau Papua merupakan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia (PTFI, 2018), sehingga menyebabkan melemahnya tingkat bargain dari PT Freeport Indonesia itu sendiri.

Pada variabel teknik manajemen, PT Freeport Indonesia memiliki *bargaining power* yang kuat. Teknik-teknik pertambangan yang digunakan oleh PT Freeport Indonesia cukup canggih, seperti *open-pit* pertambangan terbuka dan pertambangan bawah tanah yang menggunakan metode *block cave*. Selain itu, yang membuat bargain dari Indonesia melemah yaitu infrastruktur pendukung yang dimiliki dan diurus oleh PT Freeport Indonesia seperti daya listrik yang memadai, memiliki perkotaan atau camp, klinik kesehatan atau rumah sakit bagi tenaga kerja maupun masyarakat setempat, bandar udara, sarana perbengkelan, logistik dan jasa boga. PT Freeport Indonesia sangat memiliki manajemen yang canggih, teratur dan terencana. PT Freeport Indonesia juga tidak

hanya memperhatikan tenaga kerjanya saja, tetapi infrastruktur yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia juga sangat berguna bagi masyarakat setempat.

Dalam kasus negosiasi pengalihan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus sendiri, indikator yang paling penting dalam pembentukan *bargaining power* menurut tulisan ini adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Poin ini adalah poin yang paling penting menurut tulisan ini, karena perusahaan multinasional dalam hal ini PT Freeport Indonesia sangat bergantung kepada sumber daya yang dimiliki Indonesia, khususnya tambang tembaga dan mineral, Papua. PT Freeport Indonesia memiliki alat canggih yang tidak dimiliki Indonesia, serta memiliki teknik manajemen yang tertata dan terencana dengan baik, juga PT Freeport Indonesia memiliki modal yang besar, seakan semua *power* yang dimiliki PT Freeport Indonesia tidak ada artinya atau sangat lemah dibandingkan dengan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Inti utama dari perjanjian Indonesia dengan Freeport sejak dulu tahun 1967 jelas hanya mengenai sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. PT Freeport Indonesia hanya mengandalkan alat canggih dan teknik manajemen.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas, maka tulisan ini dapat menarik kesimpulan bahwa analisis *bargaining power* antara Indonesia dengan PT Freeport Indonesia dapat dilihat dari variabel-variabel *power* yang

dimiliki setiap aktor, baik aktor negara maupun aktor perusahaan multinasional. Variabel yang pertama yaitu variabel tingkat ekonomi, teknologi, populasi, sumber daya alam, dan teknik manajemen. Tingkat ekonomi meliputi tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat dari tahun 1967 sampai 2018 yang membuat bargain dari PT Freeport Indonesia melemah. Selain itu, tingkat ekonomi atau kapital finansial yang dibawa PT Freeport Indonesia ke Indonesia sangat besar dan berjumlah banyak, yang mana Indonesia bergantung dengan investasi tersebut serta akan melemahkan Indonesia sebagai *host country* dalam *bargaining power*.

Sedangkan dilihat dari variabel teknologi, teknologi canggih yang dibawa oleh PT Freeport Indonesia untuk melakukan operasi tambangnya menjadikan bargain dari Indonesia melemah. Indonesia masih bergantung kepada teknologi yang dimiliki PT Freeport Indonesia, tetapi tidak dipungkiri bahwa Indonesia perlahan akan bisa melakukan operasi pertambangan di Papua sendiri dengan cara nasionalisasi. Sehingga Indonesia juga tidak takut untuk melepaskan PT Freeport Indonesia dan mencari partner atau rekan pertambangan baru, bahkan bisa melakukan tanpa bantuan dari perusahaan asing. Tingkat teknologi yang semakin berkembang diiringi pertumbuhan industri di Indonesia juga menjadi alasan melemahnya bargain dari PT Freeport Indonesia, karena jika teknologi yang dimiliki Indonesia bisa melakukan operasi tambang secara mandiri, mau tidak mau

Indonesia harus melepaskan PT Freeport Indonesia.

Untuk populasi dan sumber daya alam, Indonesia memiliki bargain yang kuat, karena PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan multinasional sama sekali tidak memiliki populasi untuk melakukan operasi tambang yang besar di Papua. Yang paling penting yaitu sumber daya alam, karena alat-alat canggih dan teknik manajemen yang canggih dan baik akan sia-sia jika tidak memiliki sumber daya alam yang mana notabene menjadi tujuan utama dari pertambangan. Pada variabel Teknik manajemen sebenarnya akan menambatkannya bargain dari PT Freeport Indonesia dan melemahkan bargain dari Indonesia, tetapi teknik manajemen yang canggih dan mumpuni yang dimiliki dan diurus oleh PT Freeport Indonesia itu seakan tidak ada apanya dibandingkan dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.

Konsekuensi bagi Indonesia jika tidak melanjutkan kerjasamanya yaitu Indonesia belum memiliki keahlian seperti PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mengembangkan penambangan di Grasberg melalui penambangan tertutup dengan metode *block caving*. Metode *block caving* yang sedang digunakan saat ini di tambang Grasberg disebut sebagai metode yang sangat rumit dan sangat sulit di dunia. Selain itu, menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan PT Freeport Indonesia juga memiliki kesempatan untuk mengajukan perpanjangan sesuai dengan perjanjian di KK (Kontrak karya).

Sedangkan bagi PT Freeport Indonesia sendiri jika tidak menerima tawaran yang diajukan oleh Indonesia, Freeport akan kehilangan tambang emas terbesar yang ada di dunia, dimana tambang tersebut merupakan pemasukan terbesar bagi Freeport. Selain itu PT Freeport Indonesia juga memiliki alasan dimana Indonesia tidak akan melepaskan Freeport karena menurut laporan Inalum, jika Indonesia melanggar perjanjian-perjanjian, kasus tersebut akan dibawa ke arbitrase internasional, dan Indonesia dalam hal itu tidak memiliki agregat untuk memenangkan perkaranya sehingga menelantarkan kegiatan produksi pertambangan di Papua. Dengan demikian, Indonesia dan PT Freeport Indonesia memiliki alasan yang kuat dan konsekuensinya sendiri dalam melakukan negosiasi dengan menggunakan *bargaining power*-nya masing masing pada pengalihan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang mana tulisan ini dapat menyimpulkan kondisi tersebut disebabkan oleh *bargaining power* dengan dua aktor yang berbeda, negara dan perusahaan multinasional.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Mas'oe'd, Mohtar. (1997). Perusahaan Multinasional Dalam Ekonomi-Politik Internasional. Ilmu Hubungan Internasional Fisipol, Universitas Gadjah Mada.
- Mintz, Alex; DeRouen, Karl. (2010). Understanding Foreign Policy Decision Making. The United States of America by Cambridge University Press, New York.

Mas'oe'd, Mohtar. (1990). Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. LP3ES, Jakarta.

R. Viotti, Paul; V. Kauppi, Mark. (2010). International Relations Theory. Pearson Education, Inc, Longman.

ASEAN. (2018). ASEAN Selayang Pandang. Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri.

### Jurnal

Nefi, Arman; Malebra, Irawan; Puspitasari Ayuningtyas, Dyah. (2018). Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jurnal: Hukum & Pembangunan 49 No. 1 (2018): 137-163, Universitas Indonesia.

Kuswanto, Kuswanto; Hoen, Herman W; Holz hacker, Ronald. (2017). Bargaining Between Local Governments and Multinational Corporations in A Decentralised System of Governance. Jurnal: Asia Pasific Journal of Public Administration, University of Groningen.

L. Slantchev, Branislav. (2005). Introduction to International Relations, Lecture 4: Bargaining and Dynamic Commitment. Jurnal : Department of Political Science, University of California, San Diego.

Heryanto, J. (2003). Peranan Multinational Corporations dalam Industrialisasi di Indonesia Pada Era Orde Baru. Jurnal: Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Petra.

Heriyana, (2013). Multinational Corporations dalam Ekonomi Global. Jurnal: Pascasarjana Hubungan Internasional UGM, Bandung.

### Situs Internet

DetikFinance. (2016). Ini Dia Untung Ruginya Kontrak Freeport Diperpanjang, dalam <https://finance.detik.com/energi/d-3124095/ini-dia-untung-ruginya-kontrak-freeport-diperpanjang>. Diakses pada 13 September 2019.

- BBC Indonesia. (2018). Di Balik Negosiasi Freeport: Dulu 'Main Ancam' Sampai Kemudian 'Melunak', dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46696186>. Diakses pada 5 Juni 2019.
- Tribunnews. (2018). Jika Kontrak Freeport Tak Diperpanjang Hingga 2041, Ini yang Bisa Terjadi, dalam <https://www.tribunnews.com/bisnis/2018/12/22/jika-kontrak-freeport-tak-diperpanjang-hingga-2041-ini-yang-bisa-terjadi>. Diakses pada 2 Oktober 2019.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2018). Freeport Investasi Rp 250,3 Triliun, dalam <https://www.kemenperin.go.id/artikel/13213/Freeport-Investasi-Rp-250,3-Triliun>. Diakses pada 16 Oktober 2019.
- NationsOnline. (2020). First, Second, and Third World, dalam [https://www.nationsonline.org/oneworld/third\\_world\\_countries.htm](https://www.nationsonline.org/oneworld/third_world_countries.htm). Diakses pada 27 Februari 2020.
- Lexico Powered by Oxford. (2020). Comprador, dalam <https://www.lexico.com/definition/comprador>. Diakses pada 27 Februari 2020.
- PT Freeport Indonesia, (2020). Latar Belakang Sejarah PTFI, dalam <https://ptfi.co.id/id/our-heritage>. Diakses pada 27 Februari 2020.
- Binus University, (2019). Memahami Corporate Social Responsibility (CSR), dalam <https://accounting.binus.ac.id/2019/05/14/memahami-corporate-social-responsibility-csr/>. Diakses pada 27 Februari 2020.
- Badan Pusat Statistik, (2020). Pengertian Pendapatan Nasional, dalam <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html>. Diakses pada 27 Februari 2020.
- Indonesia Investment, (2020). Produk Domestik Bruto Indonesia, dalam <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253>. Diakses pada 1 Maret 2020.
- Tribunnews, (2019). Teknologi Terbaru untuk Mendorong Produktivitas Industri Pertambangan di Indonesia, dalam <https://www.tribunnews.com/techno/2019/09/21/teknologi-terbaru-untuk-mendorong-produktivitas-industri-pertambangan-di-indonesia>. Diakses pada 1 maret 2020.
- The World Bank, (2018). Population, Total – Indonesia, dalam <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.P.TOTL?end=2018&locations=ID&start=1967&type=points>. Diakses pada 1 Maret 2020.
- Worldometers, (2020). Countries in The World by Populations (2020), dalam <https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/>. Diakses pada 1 Maret 2020.
- PT Freeport Indonesia, (2017). Penggunaan Simulator Wujudkan Efisiensi Biaya & Keselamatan Kerja, dalam <https://ptfi.co.id/id/news/detail/simulator-usage-present-cost-efficiency-safety-at-work>. Diakses pada 2 Maret 2020.
- Hargrave Marshall, (2020). Capital, dalam <https://www.investopedia.com/terms/c/capital.asp>. Diakses pada 2 Maret 2020.
- PT Freeport Indonesia, (2019). Terbesar, Freeport Sumbang PNBPNP Rp.4,2 Triliun, dalam <https://ptfi.co.id/id/news/detail/terbesar-freeport-sumbang-pnbp-rp-4-2-triliun>. Diakses pada 2 maret 2020.
- PT Freeport Indonesia, (2020). PT Freeport Bangun Sport Complex Senilai Rp400 Miliar untuk PON 2020, dalam <https://ptfi.co.id/id/news/detail/pt-freeport-constructed-sport-complex-of-rp-400-billion-for-pon-2020>. Diakses pada 2 Maret 2020.
- Liputan Khusus, (2016). Menghitung Kontribusi Freeport bagi Bumi Pertiwi, dalam <https://lipsus.kontan.co.id/v2/freeport/read/302/Menghitung-kontribusi-Freeport-bagi-bumi-pertiwi#>. Diakses pada 3 Maret 2020.

- PT Freeport Indonesia, (2018). Infrastruktur Pendukung, dalam <https://ptfi.co.id/id/supporting-infrastructure>. Diakses pada 4 Maret 2020.
- Briantika Adi, (2018). Jusuf Kalla: Indonesia Masih Membutuhkan Teknologi Milik Freeport, dalam <https://tirto.id/jusuf-kalla-indonesia-masih-membutuhkan-teknologi-milik-freeport-cPqs>. Diakses pada 7 Maret 2020.
- Tribunnews, (2017). Kepala Bappenas: Indonesia Perlu Kuasai Teknologi Tambang Freeport, dalam <https://www.tribunnews.com/bisnis/2017/02/24/kepala-bappenas-indonesia-perlu-kuasai-teknologi-tambang-freeport>. Diakses pada 7 Maret 2020.
- PT Freeport Indonesia, (2019). Lembar Fakta Ketenagakerjaan, dalam <https://ptfi.co.id/site/uploads/images/5ce1f5d509c14-ketenagakerjaan-se.pdf>. Diakses pada 7 Maret 2020.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (2017). Hasil Perundingan Pemerintah-Freeport: Negara Makin Berdaulat di Negeri Sendiri, dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hasil-perundingan-pemerintah-freeport-negara-makin-berdaulat-di-negeri-sendiri>. Diakses pada 8 Maret 2020.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (2018). Perundingan Pemerintah dengan Freeport Tuntas, dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/perundingan-pemerintah-dengan-freeport-tuntas>. Diakses pada 8 maret 2020.